

Pelatihan

“Rapid Land Tenure Assessment”
di Desa Margaharja, Ciamis 28-29 Juli 2008

Oleh: Martua Sirait

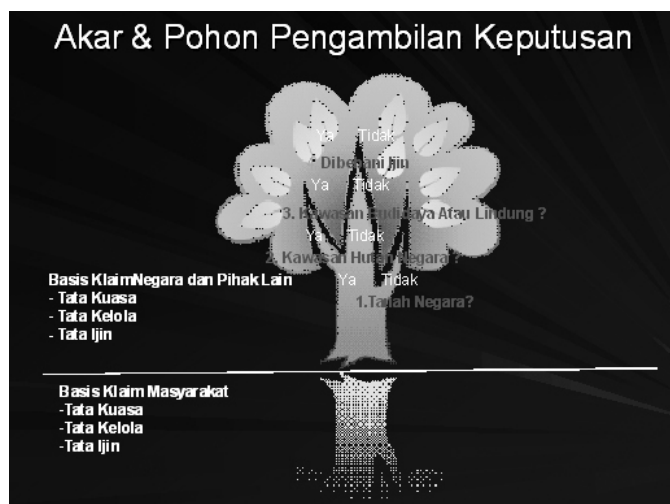
“Didieu cenah tanah Perum, lamun diditu cenah nu Kehutanan, kabeulah ditu deui cenah nu Perkebunan, naha tanah anu saya jadi euweuh?” (disini katanya tanah Perum, kalau disitu katanya tanah Kehutanan, sebelah sana katanya punya Perkebunan, kenapa tanah saya jadi hilang?) Itulah pernyataan salah satu peserta pelatihan.

Pandangan ini yang sering mengemuka dari para petani ketika mendengar bahwa **“katanya”** tanah yang dikelolanya adalah Kawasan Hutan atau mungkin dibebani ijin Kehutanan atau Perkebunan. Berbekal rumor **katanya** tersebut, cukuplah untuk mematahkan semangat petani dalam mengelola lahannya dengan orientasi jangka panjang, menanami tanahnya dengan tanaman jangka pendek, menengah dan jangka panjang tanaman berkayu.

Di masa lalu, dengan pengetahuan yang dimilikinya pada umumnya petani paham betul sejarah tanahnya, siapa yang punya, dari mana didapat, mana batas batasnya, dan apa bentuk pengelolaannya. Tetapi dengan banyaknya kegiatan dan alokasi tanah oleh pemerintah maupun pemodal, kontrol petani atas informasi tanah menjadi semakin tipis, apalagi tingkat



partisipasi rakyat dalam proses pembuatan kebijakan sangat terbatas. Sehingga rumor **katanya** sang menejer (petani dipinggir hutan) tadi berlaku dalam mengelola tanahnya.



Rumor ini perlu dijawab dengan kejelasan bagi para pihak di mana sebenarnya Kawasan Hutan Negara itu, dimana Tanah Negara lainnya, apa dokumen pendukungnya, apakah rencana pemerintah mengenai tanah tersebut dan apa bentuk ijin yang sudah diterbitkan diatasnya. Data tersebut perlu di verifikasi dan ditumpang tindihkan dengan pemahaman rakyat atas wilayah kelolanya, sehingga didapat suatu peta permasalahan penguasaan tumpang tindih tanah di wilayahnya secara terstruktur berkaitan dengan tata kuasa, tata kelola, dan tata ijin sehingga dapat diambil keputusan yang tepat (lihat gambar di samping).

Pada kesempatan 28-29 Juli 2008 lalu disempatkan diberikan pelatihan kepada para aktifis LBH-SPP di Margaharja, Ciamis dengan tiga orang nara sumber yaitu Berton Nababan (FWI), Andiko (HuMa) dan Martua Sirait (ICRAF) dan difasilitasi oleh dua orang staf LBH-SPP Erni Kartini dan Surachmad. Pelatihan diikuti peserta sebanyak 27 orang aktifis LBH SPP serta pengurus Organisasi Tani Lokal dari wilayah Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Jumlah ini jauh lebih banyak dari yang direncanakan, dimana ini menunjukkan antusiasme masyarakat. Dalam kesempatan ini diperkenalkan juga metode lain yaitu HuMa-Win yang dikembangkan oleh HuMa dan mitranya yang

mengkhususkan pendataan pada wilayah konflik yang manifest¹.

Pada saat pelatihan berlangsung, Kepala Polsek Sukadana mendatangi pelatihan ini untuk menanyakan tujuan serta materi pelatihan. Kapolsek tampak antusias setelah menerima informasi tentang pelatihan beserta buku panduannya, bahkan mengikutsertakan salah satu anggotanya yang berpakaian preman. Ini merupakan kesempatan baik bagi aparat keamanan untuk menambah pemahaman atas permasalahan tumpang tindih klaim atas tanah dan adanya metode (sisir) yang dikembangkan untuk mengurai “benang kusut” tersebut.



Foto: Martua

Pada kesempatan ini dilakukan juga diskusi kelompok serta presentasi dari 5 kasus yang ada di wilayah Tasikmalaya, Ciamis dan Garut. Keesokan harinya dilanjutkan dengan diskusi serta temuan temuan baru dari RATA dan ditutup dengan diskusi rencana tindak lanjut (RTL) berupa proses pengumpulan data lanjutan, analisis data dan rekomendasi rekomendasi untuk persiapan Pelatihan RATA selanjutnya. Dengan bekal data dan Informasi yang transparan dan dapat di verifikasi keabsahannya diharapkan akan didapatkan titik terang atas konflik tumpang tindih penguasaan tanah dan tidak lagi hanya bekal kata “**katanya**” yang begitu mengganggu rakyat dalam mengelola tanahnya. Dengan demikian proses negosiasi atas konflik tumpang tindih tanah menjadi lebih baik dan sejauh mungkin meninggalkan pendekatan kekuasaan.



Foto: Martua

¹ Metode HuMa Win adalah program computer berbasis Window yang dikembangkan oleh HuMa diperlengkapi dengan buku Manual Pendokumentasian Konflik dan Kekayaan Alam Lainnya (versi Jan 2008) dan juga diperlengkapi dengan Manual Data Basenya (Versi Januari 2008). Informasi lanjutan dapat diunduh pada web site HuMa, <http://www.huma.or.id/>